

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan tentang arah nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD/RPJPD Kabupaten. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1.1. Arahan Nasional di Bidang Ekonomi pada RKP Nasional

RPJMN 2015 – 2019 memuat visi pembangunan nasional untuk Tahun 2015 – 2019 yaitu **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"**. Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan;

Visi dan Misi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam 9 agenda prioritas pembangunan yang biasa disebut dengan **NAWA CITA** yaitu:

1. menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara;
2. membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;

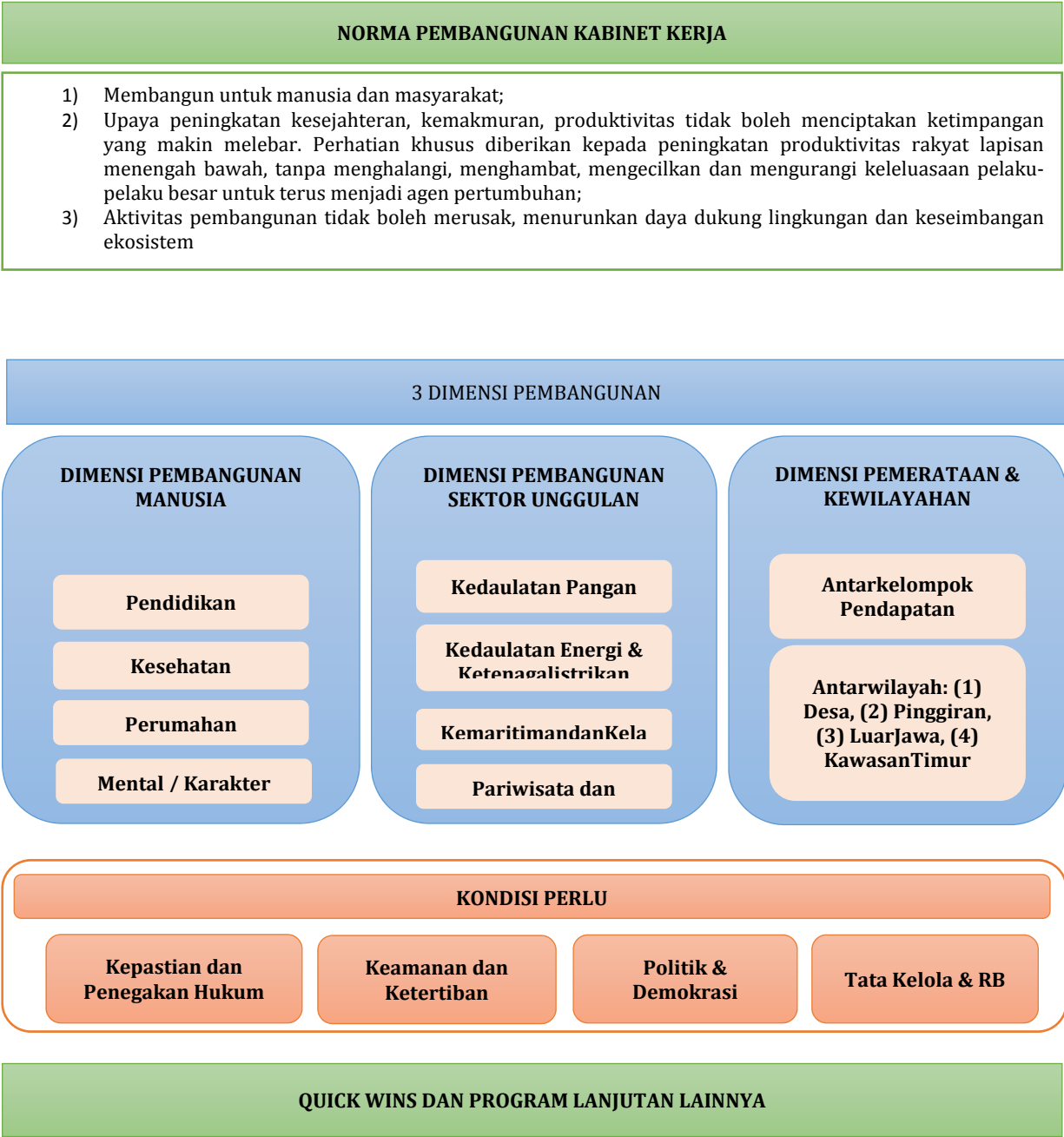
3. membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial;

Untuk mendukung visi, misi, dan agenda Nawa Cita, maka beberapa kebijakan yang diprogramkan menuju Indonesia yang jauh lebih baik adalah:

1. mengejar peningkatan daya saing;
2. meningkatkan kualitas manusia, termasuk melalui pembangunan mental;
3. memanfaatkan dan mengembalikan potensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan;
4. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan basis yang kuat dan berkualitas;
5. mengurangi ketimpangan antar wilayah;
6. memulihkan kerusakan lingkungan; dan
7. memajukan kehidupan bermasyarakat;

Adapun strategi pembangunan nasional yang diajukan yaitu:

Tabel 3.1.
Norma Pembangunan Kabinet Kerja dan Dimensi Pembangunan



Tabel 3.2. Sasaran makro RPJMN Tahun 2017 - 2019

Indikator	2014* (Baseline)	2017	2019
Pembangunan Manusia dan Masyarakat			
▪ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	75,7	76,3
▪ Indeks Pembangunan Masyarakat ¹	0,55	-	Meningkat
▪ Indeks Gini	0,41	0,38	0,36
▪ Pertumbuhan ekonomi	5,1%	5,5 - 5,9	8,0%
▪ Angka Kemiskinan	10,96 % *)	9,5 - 10,5	7,0-8,0%
▪ Pengangguran	5,94%	5,3 - 5,6%	4,0-5,0%

Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus 2016

Tabel 3.4.Rincian Pertumbuhan PDB (%)

SISI PENGELUARAN	2014	2015	2016	2017
Konsumsi Rumah Tangga	5,1	5,0	5,1	5,4 – 5,5
Investasi	4,1	5,1	5,2	6,0 – 6,6
Konsumsi Pemerintah	2,0	5,4	5,4	5,6 – 6,7
Ekspor Barang dan Jasa	1,0	-2,0	1,0	4,5 – 5,0
Impor Barang dan jasa	2,2	-5,8	1,6	4,3 – 4,8
SISI PRODUKSI				
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,2	4,0	4,2	4,2 – 4,3
Industri Pengolahan	4,6	4,3	5,4	6,2 – 6,5
Konstruksi	7,0	6,7	8,0	7,7 – 8,4
Jasa-jasa	6,6	7,9	8,5	8,5 – 8,8
Lainnya	4,6	2,5	4,3	4,9 – 5,3
PDB	5,0	4,8	5,3	5,5 – 5,9

Sumber : Paparan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas pada acara Rakorbangpus 2016

Arahan Presiden terkait Penyusunan RKP 2017:

1. Tema RKP 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”.
2. Setiap menteri dan kepala lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan.
3. Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional;
4. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata;
5. Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya.

Adapun Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) meliputi:

1. kedaulatan pangan;
2. kedaulatan energi;
3. kemaritiman;
4. industri/kawasan industri;
5. pariwisata;
6. revolusi mental;
7. kawasan perbatasan.

3.1.2. Arahan Kebijakan Ekonomi Dalam RKPD Provinsi Sulsel

Tabel 3.6.
Indikator Kinerja Daerah

NO	FOKUS / BIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SAT	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD 2012/ 2013	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN 2017	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD 2018
ASPEK KESEJAHTERAAN					
	Layanan Urusan Wajib				
A	Kemampuan Ekonomi Daerah				
1	Pertumbuhan PDRB		8.37	7,5-8,2	8,2-8,4
2	Laju Inflasi		4.41	3.80	3.20
3	PDRB per kapita		19.472.249	27.098.345	30.601.038
4	Gini Ratio Prov. Sul – Sel		0.41	0.40	0.39
5	Persentase Penduduk Miskin		9.82	7,5-8,0	5,0-6,5
6	Angka Kriminalitas yang tertangani		7.355	10.091	12.176
7	Indeks Pembangunan Manusia		72.70	74,50-75,50	75,50-76,50
8	Pantas Daya Beli (PDB)		643.590.00	656.38	662.78
9	PDRB (HB)		159.472.100	233.817.280	271.102.370
B	Pendidikan				
1	Angka melek huruf		88.73%	92.57	95.00
2	Angka rata-rata lama sekolah		7.95th	8.10	8.12
C	Kesehatan				
3	Angka usia harapan hidup		70.45	72.10	73.10
D	Ketenagakerjaan				
1	Rasio Penduduk yang bekerja		94.13	96.59	98.26
E	Penataan Ruang				
1	Rasio Ruangan Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL / HGB	%	17.73%	22%	26%
F	Koperasi Usaha Kecil dan Menegah				
1	Jumlah Wirausaha yang baru	Jiwa	12.045 orang	193.125. orang	315.845 orang

G	Ketahanan pangan				
1	Skor Pola Pangan Harapan Peningkatan diversifikasi pangan		81.60	90.80	93.10
H	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang diberdayakan dan difasilitsi hak dasarnya	Jml	2.120	4.670	6.370
	Layanan Urusan Pilihan				
1	Pertanian				
	Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per hektar				
	- Padi	%	50.98	52.01	52.53
	- Jagung	%	46.58	47.52	48.00
	- Kedele	%	15.00	15.16	15.23
2	Produksi Peternakan				
	a. Jumlah produksi Daging (kg)	kg	41.742.962.00	52.860.387.00	59.964.362.00
	b. Jumlah produksi Telur (kg)	kg	82.654.476.00	130.510.754.00	154.250.005.00
	c. Jumlah produksi Susu (kg)	kg	2.987.820.00	4.361.130.00	5.673.240.00
3	Kelautan dan Perikanan				
	Produksi Perikanan				
	a. Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Ton	2.634.084.50	3.107.879.20	3.425.909.40
	b. Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	262.480.3	270.433.7	275.889.4
4	Produksi Komoditi Unggulan				
	a. Jumlah produksi Udang (Ton)	Ton	33.200.0	34.200.0	35.000.0
	b. Jumlah produksi Bandeng (Ton)	Ton	91.502.3	97.102.0	100.000.0
	c. Jumlah produksi Rumput Laut (Ton)	Ton	2.233.259.7	2.691.686.6	3.000.000.0
5	Perdagangan				
1	Nilai ekspor Perdagangan		Nilai ekspor perdagangan thn 2012 sebesar USD 1.448.195.843.78	USD 1.821.790.258.76	USD 2.124.936.157.82

3.1.3. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017

Mendasari sasaran-sasaran yang ada pada Tabel Indikator Kinerja Daerah tersebut di atas maka ditetapkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluruh kebijakan pembangunan yang telah dijalankan pada tiga tahun sebelumnya diakselerasi pencapaian kinerjanya. Selain itu, juga dilakukan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis regional, nasional maupun global. Pada tahun ini juga dilakukan review RPJMD guna melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam merespons perubahan lingkungan strategis yang dianggap signifikan pengaruhnya.

Prioritas kebijakan pembangunan pada tahun 2017 diarahkan pada :

1. pengembangan ekonomi kerakyatan;
2. pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan, pembangunan kesehatan;
3. peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;
4. pengembangan kawasan strategis; dan
5. peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

Berikut ini ditampilkan tabel keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 – 2019 dan 11 Prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018.

Tabel 3.7. Keterkaitan antara Nawa Cita RPJMN 2015 – 2019 dan 11 Prioritas dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018

NAWACITA 1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
NAWACITA 2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
NAWACITA 3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
NAWACITA 4	Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
NAWACITA 5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
	KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
	➔ Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik PTN maupun PTS.
	➔ Dukungan Fasilitasi dan Regulasi Pembangunan Industri minimal 24 unit sesuai
	➔ Membuka 500 ribu lapangan kerja baru.
	➔ Bantuan Paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin.
	➔ Melanjutkan Pendidikan Gratis sampai tingkat SMA.
	➔ Melanjutkan kesehatan gratis.
NAWACITA 6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
	KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
	➔ Bantuan Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil.
	➔ Bantuan paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa.
NAWACITA 7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor- sektor strategis ekonomi domestik.
	KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
	➔ Bantuan Lima Juta Paket Bibit Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan
NAWACITA 8	Melakukan revolusi karakter bangsa
	KETERKAITAN DENGAN RPJMD SULSEL (11 PRIORITAS)
	➔ Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah Kejuruan Khusus seperti sekolah penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan
	➔ Gratis peningkatan kualitas pengajar melalui Boarding School untuk ; Guru SD, SMP, SMA, Guru Mengaji, Mubalig, Khatib dan Alim Ulama
NAWACITA 9	Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Kebijakan Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan

Penganggaran dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada beberapa kriteria prioritas diantaranya yaitu:

KRITERIA PRIORITAS I (KP I)

Merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% dan kesehatan 10% sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Jumlah Anggaran KP I untuk Tahun 2016 : Rp. 2.023.138.293.411,00

KRITERIA PRIORITAS II (KP II)

Program KP II merupakan program prioritas di tingkat SKPD yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat dan merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Jumlah anggaran KP II untuk Tahun 2016: Rp. 452.935.010.308,00

KRITERIA PRIORITAS III (KP III)

KP III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti : tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial kemasyarakatan, serta belanja tidak terduga. Jumlah Anggaran KP III untuk Tahun 2016 : Rp. 4.150.342.855.407,00

3.1.4. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2015 & Perkiraan Tahun 2016

Struktur ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2014 masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor Perekonomian yang memiliki peranan terbesar kedua adalah sektor jasa; ketiga, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sementara itu, sektor industri berada di urutan keenam berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Besarnya peranan sektor pertanian disebabkan oleh karena banyak penduduk memiliki lapangan usaha di sektor pertanian. Hal ini menjadi ciri khas banyak daerah di Indonesia. Padahal, untuk dapat mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas, maka kontribusi sektor harus terus diupayakan bergeser dari pertanian ke sektor industri. Bukan berarti bahwa daerah harus menurunkan kontribusi sektor pertanian, tetapi dengan menggenjot lebih tinggi sektor industri. Sebab, hal ini menjadi salah satu indikator terhadap peningkatan nilai tambah yang diperoleh masyarakat yang bisa

meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan mengolah hasil pertaniannya terlebih dahulu sebelum kemudian dijual ke pasar.

Beberapa tabel berikut ini menampilkan data PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan selama beberapa tahun terakhir ini.

Tabel 3.9 PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2011 - 2014

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ADHB

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 - 2015 (juta rupiah)

KATEGORI	URAIAN	2011		2012		2013		2014	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	910.584,7	43,7	1.061.392,7	43,1	1.245.736,2	45,6	1.555.411,9	44,9
b	Pertambangan Dan Penggalian	14.806,3	0,7	19.078,9	0,8	23.791,9	0,9	33.332,3	1,0
c	Industri Pengolahan	69.853,6	3,4	77.392,3	3,1	87.485,4	3,2	96.843,1	2,8
d	Pengadaan Listrik dan Gas	2.610,3	0,1	2.806,9	0,1	2.829,9	0,1	3.068,3	0,1
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.869,0	0,1	3.244,4	0,1	3.452,5	0,1	4.046,7	0,1
f	Konstruksi	349.617,9	16,8	433.433,7	17,6	544.596,1	19,9	677.643,3	19,6
g	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	148.488,6	7,1	212.122,0	8,6	234.962,3	8,6	263.205,5	7,6
h	Transpotasi dan Pergudangan	47.972,4	2,3	55.734,0	2,3	65.023,6	2,4	81.873,3	2,4
i	Penyediaan Akomodasi	5.010,8	0,2	5.613,2	0,2	6.137,6	0,2	7.146,5	0,2
j	Informasi dan Komunikasi	58.347,3	2,8	66.959,3	2,7	75.650,7	2,8	81.067,0	2,3
k	Jasa Keuangan Dan Asuransi	22.065,6	1,1	28.920,4	1,2	35.502,1	1,3	42.398,3	1,2
l	Real Estate	34.145,1	1,6	40.041,8	1,6	45.791,7	1,7	52.903,6	1,5
m,n	Jasa Perusahaan	312,6	0,0	386,1	0,0	477,4	0,0	583,9	0,0
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	230.702,7	11,1	248.903,7	10,1	269.720,1	9,9	296.958,8	8,6
p	Jasa Pendidikan	134.623,7	6,5	152.108,2	6,2	28.530,3	1,0	193.238,5	5,6
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40.851,7	2,0	45.520,5	1,8	51.184,1	1,9	58.937,3	1,7
r,s,t,u	Jasa Lainnya	9.945,6	0,5	11.277,7	0,5	12.828,7	0,5	14.859,9	0,4
T o t a l		2.082.807,9	100,0	2.464.935,8	100,0	2.733.700,6	100,0	3.463.518,2	100,0

Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2015 dan Hasil Proyeksi

Keterangan :

*= Angka sementara hasil proyeksi

**= Angka sangat sementara hasil proyeksi

Tabel 3.10, PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK Tahun 2011 - 2015

PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ADHK 2010
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 - 2015

Kategori	URAIAN	2011		2012		2013		2014		2015	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	850.343,4	43,2	906.778,0	42,7	989.261,1	42,7	1.115.059,0	44,1	1.220.801,2	44,3
b	Pertambangan Dan Penggalian	13.587,2	0,7	15.975,4	0,8	17.623,9	0,8	19.894,2	0,8	22.598,3	0,8
c	Industri Pengolahan	67.832,4	3,4	71.124,2	3,4	76.406,8	3,3	80.529,7	3,2	85.274,5	3,1
d	Pengadaan Listrik dan Gas	2.634,3	0,1	2.935,1	0,1	3.183,6	0,1	3.512,2	0,1	3.865,8	0,1
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.737,9	0,1	3.058,5	0,1	3.128,5	0,1	3.535,4	0,1	3.853,6	0,1
f	Konstruksi	312.472,5	15,9	349.433,6	16,5	396.697,4	17,1	430.618,9	17,0	479.286,6	17,4
g	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	171.435,7	8,7	188.800,4	8,9	203.424,3	8,8	221.138,4	8,7	240.733,2	8,7
h	Transpotasi dan Pergudangan	44.725,0	2,3	48.198,2	2,3	52.394,1	2,3	58.319,7	2,3	63.720,3	2,3
i	Penyediaan Akomodasi	4.818,0	0,2	5.107,4	0,2	5.422,8	0,2	5.691,2	0,2	6.016,2	0,2
j	Informasi dan Komunikasi	57.987,1	2,9	64.480,0	3,0	71.893,3	3,1	76.779,1	3,0	84.326,5	3,1
k	Jasa Keuangan Dan Asuransi	20.709,7	1,1	24.495,4	1,2	28.099,5	1,2	28.798,4	1,1	32.204,3	1,2
L	Real Estate	33.657,6	1,7	36.496,1	1,7	39.683,6	1,7	43.064,3	1,7	46.751,5	1,7
m,n	Jasa Perusahaan	289,5	0,0	330,6	0,0	378,6	0,0	426,1	0,0	484,7	0,0
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	210.574,3	10,7	217.814,5	10,3	229.423,0	9,9	233.983,3	9,2	242.372,0	8,8
p	Jasa Pendidikan	126.461,4	6,4	136.995,3	6,5	146.810,2	6,3	151.635,4	6,0	161.128,2	5,8
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	37.926,4	1,9	40.454,5	1,9	43.046,1	1,9	45.991,2	1,8	49.044,1	1,8
r,s,t,u	Jasa Lainnya	9.636,5	0,5	10.334,7	0,5	10.913,6	0,5	11.671,3	0,5	12.441,2	0,5
Total		1.967.829	100	2.122.812	100	2.317.790	100	2.530.648	100	2.754.902	100

Sumber: Kabupaten Kepulauan Dalam Angka 2015 dan Hasil Proyeksi

Keterangan :

*= Angka sementara hasil proyeksi

**= Angka sangat sementara hasil proyeksi

Perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar yang direpresentasikan melalui indikator makro ekonomi selama Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan ke arah positif.

Tabel 3.12
PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 – 2014

Periode	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010
1	2	3
PDRB Perkapita		
2011	17 080 894	15 856 290
2012	19 624 818	16 900 964
2013	22 636 302	18 218 760
2014	26 902 367	19 656 456
Pertumbuhan Ekonomi		
2011	8.88	
2012	7.88	
2013	9.18	
2014	9.18	

Cat: *, **= Angka sementara hasil proyeksi

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa PDRB perkapita Kabupaten Kepulauan Selayar terus mengalami peningkatan baik dilihat dari PDRB berdasarkan atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

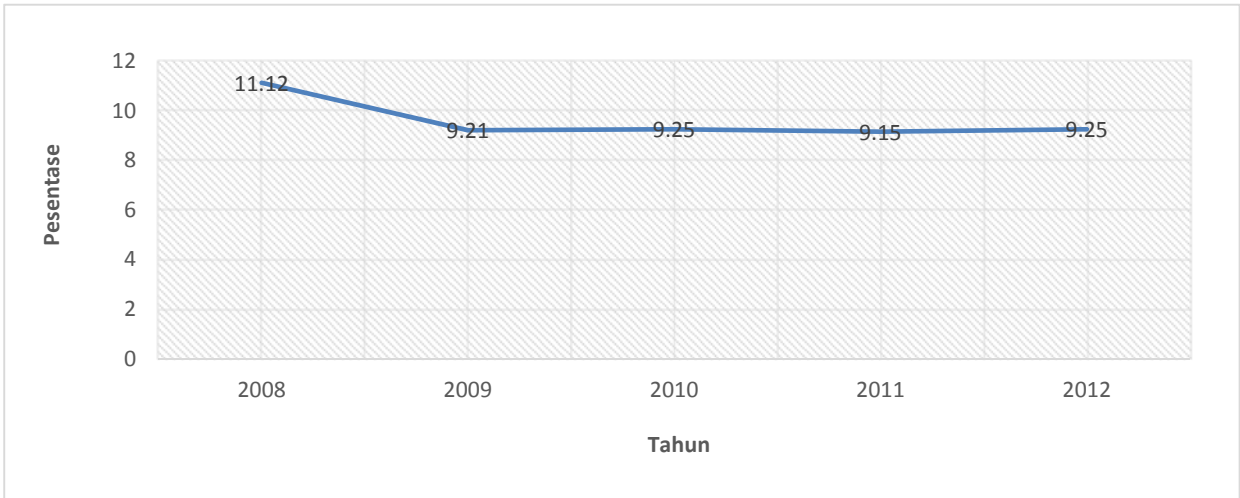
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung mengalami peningkatan dikarenakan dukungan pemerintah terhadap tumbuh kembangnya sektor bangunan dan sektor lainnya tanpa mengabaikan sektor pertanian sebagai basis perekonomian yang berkontribusi besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara rata-rata, perekonomian Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 tahun terakhir tumbuh sebesar 8 - 9%.

Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar diproyeksi akan bergerak positif, meskipun dengan sedikit perlambatan.

A. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi. Di satu sisi, tingkat inflasi yang relatif tinggi merupakan hal yang dapat merugikan perekonomian, yaitu dapat berdampak pada lemahnya daya beli masyarakat dan melambatnya perkembangan produksi. Di sisi lain, inflasi juga dibutuhkan oleh produsen yaitu untuk dapat mempengaruhi perkembangan penawaran terhadap barang dan jasa. Adapun gambaran laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.1. Laju inflasi Kabupaten Kepulauan Selayar



3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan Tahun 2017

Berbagai kebijakan Pemerintah Daerah diarahkan untuk memperbaiki prospek pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat melalui tinjauan terhadap perkembangan beberapa variabel ekonomi makro yang dijadikan sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan dengan distribusinya, pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, aspek harga yang ditunjukkan dengan fluktuasi dari tingkat harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi, aspek perdagangan terkait hubungan dengan negara lain yang

ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Ketiga hal tersebut dapat terealisasi jika didukung peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, pemerintah maupun dari dunia perbankan serta lembaga ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara efisien dan efektif didukung dengan pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*.

Perkembangan kondisi perekonomian daerah ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Dari sisi *demand*. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar terutama didukung oleh kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan konsumsi yang semakin baik. Terkait dengan *supply* dimana pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor pertanian, perdagangan dan jasa serta sektor industri pengolahan. Disamping itu, kedepan diprediksi bahwa kinerja perekonomian akan menunjukkan fluktuasi.

Hal yang menjadi tantangan kedepan untuk diperbaiki adalah kemampuan daya beli masyarakat sehingga distribusi pendapatan akan semakin membaik. Hal lain dari aspek pendapatan yang belum mendapatkan perhatian selama ini adalah aspek pemerataannya. Ukuran terkait dengan distribusi pendapatan, yang semakin menunjukkan perbaikan namun masih memperlihatkan besarnya tingkat ketimpangan distribusi kesejahteraan ekonomi antar penduduk dan hal ini menjadi tantangan kedepan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh komoditas unggulan daerah seperti cengkeh, pala, jambu mente, kakao, rumput laut dan ternak sapi juga belum dikelola secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah ketidakstabilan harga pasar sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedepan akan dilakukan perbaikan kualitas terhadap komoditas unggulan tersebut terutama yang memiliki peluang ekspor sehingga memiliki daya saing dipasar global. Dengan demikian, hal ini diharapkan akan berimplikasi positif dan memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut disajikan hal-hal yang menjadi peluang dan tantangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.13
Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kondisi Internal Daerah		Kondisi Eksternal Daerah	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Faktor fisik Alami :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas andalan subsektor tanaman pangan adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan padi; 2. Masih tersedia lahan (19.831 ha) untuk perluasan; 3. Komoditas tanaman pangan lainnya yang potensial untuk dikembangkan adalah kacang tanah, kedelai, kacang hijau, buah-buahan, dan sayuran; 4. Komoditas yang berpotensi besar untuk sub sektor perkebunan adalah kelapa dalam (coconut), kemiri, pala, dan jambu mete; 5. Lahan yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan masih luas; 6. Produk potensial dari sub sektor kehutanan baru berupa rotan; 7. Adanya hutan produksi (7.250 ha) dan hutan semak belukar (5.869 ha) memungkinkan untuk dimanfaatkan bagi komoditas lainnya; 8. Komoditas potensial untuk sub sektor peternakan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras, ayam buras, dan itik; 9. Selayar dikelilingi laut dalam yang dapat dilayari berbagai ukuran kapal; 10. Adanya Kawasan pantai-pantai yang strategis; 11. ikan laut, budidaya pantai (rumput laut) dan ikan tambak yang tersebar di 7 kecamatan; 12. Luasnya lahan budi daya tambak, sebagian besar di Bontoharu, Bontosikuyu dan Pasimasunggu; 13. Keberadaan taman laut dan terumbu karang di 7 kecamatan; 14. Taman laut di Takabonerate memiliki keunggulan kompetitif berskala internasional; 15. Adanya pantai laut dan 	<p>Faktor Fisik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebaran batuan permukaan yang relatif besar menyebabkan potensi pengembangan sangat terbatas (khususnya bagian Utara); 2. Kondisi hidrologi sangat terbatas karena kurangnya catchment area, luasan DAS sangat sempit dan luasnya sebaran batuan permukaan yang kedap air; dan 3. Terbatasnya areal garapan untuk pengembangan pertanian dan perkebunan meskipun tingkat kesuburan tanahnya relatif baik khususnya di bagian Utara. <p>Faktor Non Fisik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kualitas pengelola pembangunan dalam upaya percepatan pembangunan; 2. Potensi tenaga kerja terampil masih relatif kurang; 3. Tingginya biaya transportasi dalam pemasaran hasil produksi; dan 4. Layanan sarana transportasi masih terbatas terhadap wilayah-wilayah permukiman. <p>Faktor Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan transportasi regional belum 	<p>Faktor Sumber Daya Alam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi pengembangan Sumber Daya Alam, dengan ditetapkannya beberapa blok pengembangan migas di Selayar (blok karaeng, blok selayar dan blok kambuno) oleh pemerintah pusat; 2. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi Perkebunan, terbukti dengan ditetapkannya Kawasan Strategis pengembangan sentra pertanian dan perkebunan dalam RTRW Provinsi Sulsel (Perda Nomor 9 Tahun 2009); dan 3. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Taman Nasional Takabonerate yang berpotensi dalam pengembangan sektor pariwisata, dukungan pemerintah 	<p>Faktor Pendukung Lainnya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimnya dukungan pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar; 2. Minimnya minat investor terhadap pengembangan Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3. Minimnya informasi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar pada dunia investasi; 4. Belum kuatnya regulasi pendukung untuk pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 5. Minimnya minat Sumber Daya Manusia untuk memberikan dukungan terhadap potensi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

No	Kondisi Internal Daerah		Kondisi Eksternal Daerah	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	<p>pasir putih di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;</p> <p>16. Adanya hutan wisata di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;</p> <p>17. Adanya air terjun di pegunungan di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, Pasimarannu dan Pasimasunggu;</p> <p>18. Adanya taman buru di Bontomatene, Bontoharu, Bontosikuyu, dan Pasimasunggu;</p> <p>19. Adanya sumber air panas di Desa Bontobulaeng dan Dusun Maminasa (kecamatan Pasimasunggu); dan</p> <p>20. Ada rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara.</p> <p>Faktor Sarana dan Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pelayaran wisata yang dikelola Spice Island Explorer; 2. Ada jalan provinsi (90 km) yg menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng - Patori (50 km); 3. Adanya penyeberangan fery dari dermaga Pamatata ke Tanjung Bira; 4. Adanya penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba; 5. Ada pelabuhan rakyat (untuk nelayan) di Jampea dan Bonerate, walau berskala kecil; 6. Adanya Bandara di Kab. Kepulauan Selayar yang menghubungkan antara Ibukota Provinsi dengan Kepulauan Selayar; 7. Jalan provinsi (90 km) dengan kondisi mantap, menghubungkan Benteng-Barang-barang (40 km) dan Benteng-Patori (50 km); dan 8. Ada penyeberangan langsung dari Pelabuhan Benteng ke Pelabuhan Bulukumba; 	<p>mencapai seluruh wilayah (wilayah selatan relatif belum terlayani optimal);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Perlu pembukaan aksesibilitas ke luar Kabupaten Kepulauan Selayar dan arah selatan; 3. Sarana transportasi untuk penangkapan ikan masih tradisional; 4. Perlu aksesibilitas ke arah selatan (ke luar Sulawesi) untuk pemasaran; dan 5. Perlu peningkatan kuantitas moda transportasi. <p>Faktor Pendukung Lainnya ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu penyediaan fasilitas pendidikan dan keterampilan kepariwisataan, dan pusat pelayanan informasi kepariwisataan; dan 2. Potensi alami untuk irigasi terbatas, sehingga pengembangan pertanian lebih diarahkan pada jagung yang tak butuh air banyak. <p>Faktor Sumber Daya Manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu upaya peningkatan mutu SDM (bahasa, pengetahuan, ketrampilan, dan manajemen pariwisata; 2. Perlu ditekankan dan diupayakan penanaman dan penguatan nilai, norma agama, dan budaya timur; 3. Tingkat penguasaan IPTEK perikanan para nelayan masih kurang/tradisional; dan 	pusat terkait pengembangan pariwisata Takabonerate.	

No	Kondisi Internal Daerah		Kondisi Eksternal Daerah	
	Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Faktor Pendukung Lainnya : 1. Adanya tempat pelelangan ikan; 2. Adanya tambak ikan yang tersebar di Seluruh Kecamatan; 3. Adanya industri rumah tangga untuk pengeringan hasil laut (ikan kering, teripang, cumi kering, rumput laut, sirip ekor hiu; dan 4. Adanya industri kecil dan rumah tangga pengolah hasil pertanian lokal (industri minyak goreng, pengupasan/ pembersihan biji-bijian, kopra, krupuk, dan gula merah.	4. Perlu upaya pembinaan, pelatihan bidang pertanian (karena umumnya pendidikan SD-SLTP).		

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Uraian berikut ini terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

Arah kebijakan pembangunan daerah Kepulauan Selayar diarahkan pada:

1. peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan yang ditopang oleh sektor riil ekonomi kerakyatan terutama dari sektor perikanan dan pariwisata dengan dukungan jasa pemasaran dari berbagai lembaga terkaitut yaitu UMKM dan usaha ekonomi kreatif lainnya. Tambahan lagi, dukungan diharapkan dair sektor yang berbasis sumber daya alam di sektor pertanian, jasa, pertambangan dan angkutan serta peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian dan subsektornya ke sektor industri yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat;
2. pembangunan infrastruktur dan prasarana wilayah untuk mempercepat arus barang dan jasa;

3. stimulasi untuk meningkatkan investasi swasta dalam sektor perhubungan, energi serta sektor lainnya dalam kerangka hasil kajian Blue Print Pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang rasional dan realistis melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan; dan
5. peningkatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta lembaga donor internasional untuk memperoleh dukungan pembiayaan, program dan kegiatan, serta asistensi sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah atas keterbatasan pembiayaan dan kapasitas keuangan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara umum, Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami peningkatan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi kenaikan tingkat Pendapatan Daerah. Selain itu, Pemerintah Daerah terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017, selain mengacu pada realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 juga mengacu pada rencana pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2016. Tabel berikut ini berisi gambaran mengenai realisasi dan proyeksi pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018.

Tabel 3.14 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No.	U R A I A N	JUMLAH				
		Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/	Proyeksi/
		2014	2015	2016	Target	Target
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Pendapatan Asli Daerah	33,697,866,489	39,316,368,000	46,477,787,000	48,145,161,000	50,552,419,050
1.1.1	Pajak Daerah	4,184,916,862	4,790,000,000	4,952,000,000	5,452,000,000	5,724,600,000
1.1.2	Retribusi Daerah	7,376,165,857	9,467,000,000	13,144,500,000	13,819,500,000	14,510,475,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7,587,079,072	7,945,000,000	9,700,000,000	9,700,000,000	10,185,000,000
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	14,549,704,698	17,114,368,000	18,681,287,000	19,173,661,000	20,132,344,050
1.2	Dana Perimbangan	547,019,012,578	584,523,168,000	774,284,000,020	801,075,808,020	841,129,598,421
1.2.1	Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak	19,190,969,578	23,337,468,000	23,510,764,000	23,510,764,000	24,686,302,200
1.2.2	Dana Alokasi Umum	458,019,013,000	479,393,610,000	535,836,163,000	562,627,971,000	590,759,369,550
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	69,809,030,000	81,792,090,000	214,937,073,020	214,937,073,020	225,683,926,671
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah	87,597,988,180	98,689,154,000	77,247,637,000	77,247,637,000	81,110,018,850
1.3.1	Hibah					
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Bagi Hasil dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	17,713,203,980	17,722,169,000	20,690,573,000	20,690,573,000	21,725,101,650
1.3.4	Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus	63,375,993,000	65,548,374,000	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	6,508,791,200	6,508,792,000	5,710,079,000	5,710,079,000	5,995,582,950
1.3.6	Dana Desa		8,909,819,000	50,846,985,000	50,846,985,000	53,389,334,250
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3)	668,314,867,247	722,528,690,000	898,009,424,020	926,468,606,020	1,023,344,455,371

Pada Tahun 2014, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 668,314,867,247,00, sementara Tahun 2015, sebesar Rp. 722,528,690,000. Tahun 2016 pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 898,009,424,020, sementara Tahun 2017 dan Tahun 2018 diproyeksikan

berturut-turut sebesar Rp 926,468,606,020,00 dan Rp. 1,023,344,455,371,00. Apabila dilihat ke dalam komponen Pendapatan daerah maka akan didapati bahwa dalam komponen itu antara lain, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum, realisasi, anggaran tahun berjalan maupun proyeksi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp. 33,697,866,489,00 dan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 39,316,368,000,00 pada Tahun 2016 Pendapatan Asli daerah ditargetkan sebesar Rp. 46,477,787,000,00 sementara untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 diproyeksikan masing-masing senilai Rp. 48,145,161,000,00 dan Rp. 50,552,419,050,00

3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, kemampuan masyarakat, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah, serta memperhatikan kinerja tahun -tahun sebelumnya.

Kebijakan pokok Pendapatan Daerah Tahun 2017 diarahkan pada beberapa kebijakan pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak;
- b. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. perbaikan basis data pajak serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan;
- d. peningkatan koordinasi dan kerjasama antar SKPD;
- e. peningkatan kualitas aparat pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pemanfaatan aset daerah, khususnya yang tidak termanfaatkan secara optimal;

- g. pengembangan sistem insentif untuk merangsang peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. penyesuaian dasar pengenaan pajak daerah;
- i. optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan kewenangan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- j. peningkatan kinerja dan kontribusi BUMD melalui peningkatan profesionalisme BUMD, pengelolaan BUMD secara lebih efisien dan efektif serta memperkuat permodalan BUMD;
- k. pemberlakuan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; dan
- l. optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.

2. Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan transfer Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah akan melakukan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), dilakukan upaya melalui penyempurnaan data-data fiskal daerah dan peningkatan kinerja perekonomian daerah. Selain itu dengan memanfaatkan e-Proposal untuk meningkatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal lainnya yang akan diupayakan adalah peningkatan daya serap anggran SKPD serta peningkatan disiplin penggunaan anggaran.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi untuk meningkatkan bagi hasil pajak dari provinsi, Tunjangan Guru Sertifikasi dan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi serta penyesuaian bantuan keuangan dari provinsi seperti pendidikan gratis dan kesehatan gratis serta pembiayaan kegiatan-kegiatan prioritas.

Sehubungan dengan arah kebijakan tersebut, akan dilakukan upaya oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapai target pendapatan yang ada, diantaranya:

1. dalam penetapan target pendapatan daerah dilakukan rasionalisasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun sebelumnya, memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi dan mengevaluasi realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait;
2. melakukan perbaikan aplikasi Mapatda dan PBB-P2;
3. mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
4. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
5. melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
6. melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; dan
7. melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah tingkat atas baik provinsi maupun pusat.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Belanja Daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai (performance-based budgeting).

Kebijakan belanja daerah memberi prioritas kepada pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, selanjutnya ditampilkan realisasi dan proyeksi belanja daerah dalam format tabel berikut ini:

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No.	U R A I A N	JUMLAH				
		Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/	Proyeksi/
		2014	2015	2016	Target	Target
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Belanja Tidak Langsung	303,180,585,180	382,053,946,000	473,412,334,700	493,627,073,000	518,308,426,650
2.1.1	Belanja Pegawai	260,394,469,278	316,408,140,000	357,145,954,700	377,166,214,000	396,024,524,700
2.1.2	Belanja Bunga					
2.1.3	Belanja Subsidi					
2.1.4	Belanja Hibah	760,000,000	13,500,000,000	5,500,000,000	2,000,000,000	2,100,000,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial		17,500,000	175,000,000	1,000,000,000	1,050,000,000
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa	182,606,900	1,300,000,000	1,809,702,000	2,000,000,000	2,100,000,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Prop. / Kab / Kota / Pemerintah Desa	41,445,687,602	49,789,306,000	107,781,678,000	110,460,859,000	115,983,901,950
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	397,821,400	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,050,000,000
B	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	303,180,585,180	382,053,946,000	473,412,334,700	493,627,073,000	518,308,426,650
2.2	Belanja Langsung	349,499,165,786	349,974,744,000	480,553,194,067	427,841,533,020	500,036,028,721
2.2.1	Belanja Pegawai	57,828,096,679	60,905,842,850	48,445,765,190	48,445,765,190	50,868,053,450
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122,905,606,991	127,653,485,150	182,915,084,952	182,915,084,952	192,060,839,200
2.2.3	Belanja Modal	168,765,462,116	161,415,416,000	249,192,343,925	196,480,682,878	257,107,136,072
C	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	349,499,165,786	349,974,744,000	480,553,194,067	427,841,533,020	500,036,028,721
D	TOTAL JUMLAH BELANJA	652,679,750,966	732,028,690,000	953,965,528,767	921,468,606,020	1,018,344,455,371

Belanja Daerah digunakan untuk membiayai :

1. belanja pegawai yang meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain;
2. belanja telepon, air, listrik, dan internet;
3. belanja wajib yang sifatnya mengikat; dan
4. belanja prioritas SKPD yaitu untuk membiayai kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan urusan pemerintahan. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2017 diupayakan untuk Akselerasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik demi Mewujudkan Masyarakat Maritim yang Sejahtera Menuju Daya Saing Daerah, yaitu dengan mengupayakan agar bukan hanya pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat tetapi juga dimkasudkan agar pelayanan public dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan daya saing daerah. Arah kebijakan Belanja Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

1. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :
 - a. menyesuaikan kenaikan gaji pokok berdasarkan kebijakan nasional terhadap gaji dan tunjangan 2017 serta acress sebesar 2,5 persen;
 - b. mengalokasikan gaji ketiga belas dan keempat belas bagi PNSD;
 - c. mengalokasikan gaji dan tunjangan bagi CPNS yang baru diterima melalui jalur penerimaan Umum dan K2; dan
2. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan untuk :
 - a. pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU); dan
 - b. Pembayaran belanja telepon, air, listrik dan internet (TALI).

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas dalam Pencapaian Visi serta Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 – 2021

1. Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 – 2021;
2. Pelaksanaan Program Sehat, Unggul, Cerdas, Infrastruktur (SUCI) Bupati dan Wakil Bupati periode 2016 – 2021;
3. Pelaksanaan Kontrak Politik Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016 – 2021;
4. Penyiapan pra kondisi Kepulauan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Nasional.

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT MARITIM YANG SEJAHTERA BERBASIS NILAI KEAGAMAAN DAN KULTURAL

MISI:

1. Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik melalui pendekatan aspiratif, partisipatif dan transparan;
3. Mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
4. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi swasta di sektor perikanan, kelautan dan pariwisata;
5. Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah;
6. Mewujudkan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah serta sentra pertumbuhan di sektor agrobisnis, agromaritim, yang berbasis pada ekonomi kerakyatan;
7. Mewujudkan pelestarian tradisi dan kearifan lokal melalui strategi kebudayaan.

Program SUCI (Sehat, Unggul, Cerdas, Infrastruktur)

20 agenda aksi

1. Melaksanakan penataan struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif;
2. Menerapkan E-government dalam peningkatan pelayanan publik;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberlakukan sistem prestasi kerja dan karir;
4. Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan;
7. Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak;
8. Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, dan air bersih/minum;
9. Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi di daratan dan kepulauan;
10. Mengembangkan destinasi dan atraksi budaya serta meningkatkan promosi wisata;
11. Memberikan akses dan kemudahan investasi swasta;
12. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah dalam membangun sinergitas dalam pengelolaan sumber daya kemaritiman;
13. Membangun sentra pengembangan komoditas di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan;
14. Meningkatkan kesadaran dan upaya pelestarian fungsi lingkungan;
15. Memberikan peluang dan kesempatan untuk pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi bagi masyarakat yang berbasis teknologi;
16. Memberikan dukungan permodalan dan manajemen bagi UMKM dalam meningkatkan daya saing serta mencetak 1000 wirausahawan yang tersebar di masing-masing desa dan kelurahan;

17. Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat;
18. Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu;
19. Membangun kesadaran politik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi;
20. Membangun pusat studi pengkajian agama dan budaya.

Kontrak Politik

1. Gratis pakaian sekolah, sepatu, tas, alat tulis, dan bantuan biaya bagi tamatan SMA yang memasuki perguruan tinggi;
2. Gratis pengurusan KK, KTP, dan Akta Kelahiran;
3. Gratis raskin dan bedah rumah 1000 unit/tahun;
4. Gratis operasi, persalinan dan pengangkutan pasien ke rumah sakit rujukan;
5. Gratis jaminan kecelakaan 10 jt/KK
6. Gratis uang muka pemasangan listrik PLN dan air bersih PDAM;
7. Gratis alat perikanan, pertanian, dan bibit ternak sapi 4 ekor/KK dan kambing 10 ekor /KK;
8. Bantuan modal usaha bagi UMKM 7,5 jt/KK;
9. Bantuan pertukangan, perbengkelan, dan jahit menjahit berdasarkan profesi;
10. Bantuan makan minum bagi penumpang kapal ferry yang pelayarannya tertunda di pelabuhan Bira, Bulukumba;
11. Tunjangan hidup bagi anggota masyarakat yang cacat fisik, mental, orang tua jompo dan yatim piatu;
12. Tunjangan kematian dan ta'ziah;
13. Tunjangan haji/umrah bagi guru dan PNS lainnya yang berprestasi;
14. Menyangga harga komoditas andalan (kopra, pala, cengkeh, jambu mete dan lain-lain)

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1. melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD / OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
2. meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten, termasuk penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;
3. mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
4. melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS yaitu bahwa penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan ini untuk memenuhi pengalokasian hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Hibah dan bantuan sosial harus memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

E. Kebijakan Terkait Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan dianggarkan bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

F. Kebijakan terkait Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan dan Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Tabel 3.16
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
 Tahun 2014 s.d Tahun 2018

No.	U R A I A N	JUMLAH				
		Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/	Proyeksi/
		2014	2015	2016	Target	Target
					2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Penerimaan Pembiayaan	44,413,135,806	9,500,000,000	56,456,104,747	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	44,319,279,002	9,500,000,000	56,456,104,747	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-		-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-		-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-		-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	93,856,804	-		-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	44,413,135,806	-	56,456,104,747	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	-	500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-		-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	2,000,000,000	-	500,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-		-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-		-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2,000,000,000	-	55,956,104,747	(5,000,000,000)	(5,000,000,000)
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	44,413,135,806	-		-	-

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Sumber Penerimaan Pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016.

B. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2017, Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan diarahkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada Bank Sulselbar, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tana Doang dan Perusahaan Daerah.